



## **LEMBARAN DAERAH**

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN**  
**NOMOR : 8      TAHUN 1996      SERI D NO.SERI 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 5 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA**  
**DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN**  
**DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN**

Proyek Inventarisasi & Kodifikasi Hukum  
Peraturan Daerah T.A. 1996/1997

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**HULU SUNGAI SELATAN**

L E M B A R A N      D A E R A H  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR : 8      TAHUN 1996      SERI D      NO. SERI : 5  
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 1996

TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai perwujudan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dalam menangani urusan kebersihan dan penataan taman secara mantap dan terkoordinir, perlu dibentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Februari 1996 Nomor 061/733/SJ ;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a. pertimbangan ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 ) ;



2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 ) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487 ) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1993 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Persyaratan, Tata Cara Pengajuan Usul Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1994 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATAKERJA DINAS KEBERSIHAN DAN  
PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II HULU SUNGAI SELATAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

Paal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
  - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
  - c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
  - d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
  - e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

### BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.



## Bagian Kedua Kedudukan

### Pasal 3

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

## Bagian Ketiga Tugas

### Pasal 4

- Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang kebersihan dan pertamanan ;
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang kebersihan dan pertamanan.

## Bagian Keempat Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah ;
- b. pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan tugas pokok sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. pembinaan operasional kebersihan jalan dan lingkungan, pengangkutan, pemusnahan dan pemanfaatan sampah dilokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ;
- d. pengadaan atau penyediaan sarana dan prasarana kebersihan sesuai dengan keperluan yang telah ditentukan ;

- e. pengawasan dan pelaksanaan pembibitan tanaman serta pengendalian pembangunan dan pemeliharaan taman dan tanaman ;
- f. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan kantor.

### BAB . III ORGANISASI

#### Bagian Pertama Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Operasional ;
  - d. Seksi Sarana dan Perawatan ;
  - e. Seksi Pertamanan ;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua Unsur-Unsur Dinas Kebersihan dan Pertamanan

#### Paragraf 1 Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan anggaran, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tata laksana ;



- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan inventarisasi ;
- c. penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan keputakaan.

#### Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan.

#### Pasal 10

- (1) Urusan Umum , mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi.
- (2) Urusan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan, dokumentasi dan keputakaan, penyajian data dan informasi serta hubungan masyarakat.
- (3) Urusan keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan.

#### Paragraf 2 Seksi Operasional

#### Pasal 11

Seksi Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan di bidang operasional kebersihan.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Operasional mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebersihan jalan dan lingkungannya ;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ;
- c. pelaksanaan penampungan, pemusnahan dan pemanfaatan sampah di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

#### Pasal 13

Seksi Operasional terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan ;
- b. Sub Seksi Pengangkutan ;
- c. Sub Seksi Penampungan dan Pemusnahan Sampah.

#### Pasal 14

- (1) Sub Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kebersihan jalan dan lingkungan.
- (2) Sub Seksi Pengangkutan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk keperluan kebersihan.
- (3) Sub Seksi Penampungan dan Pemusnahan Sampah mempunyai tugas melaksanakan penampungan, pemusnahan dan pemanfaatan sampah di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

#### Paragraf 3

#### Seksi Sarana dan Perawatan

#### Pasal 15

Seksi Sarana dan Perawatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan dibidang Sarana dan Perawatan Kebersihan.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana dan Perawatan mempunyai fungsi :



- a. pelaksanaan pengadaan/penyediaan peralatan, sarana dan prasarana kebersihan ;
- b. pelaksanaan penyiapan peralatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan ;
- c. pelaksanaan penyimpanan dan pengeluaran barang.

#### Pasal 17

Seksi Sarana dan Perawatan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengadaan ;
- b. Seksi Pemeliharaan ;
- c. Seksi Gudang.

#### Pasal 18

- (1) Sub Seksi Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan/penyediaan kebersihan, sarana dan prasarana peralatan.
- (2) Sub Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan peralatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan.
- (3) Sub Seksi Gedung mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan dan pengeluaran barang dan peralatan kebersihan.

#### Paragraf 4 Seksi Pertamanan

#### Pasal 19

Seksi Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan di bidang Pertamanan.

#### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan, penelitian, pengawasan dan pelaksanaan pembibitan tanaman ;
- b. penyiapan, perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pengendalian ;

- c. pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pertamanan.

#### Pasal 21

Seksi Pertamanan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan ;
- b. Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman ;
- c. Sub Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan.

#### Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan mempunyai tugas menyiapkan, meneliti, melaksanakan dan mengawasi pembibitan tanaman.
- (2) Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pembangunan dan pemeliharaan taman dan tanaman.
- (3) Sub Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan mempunyai tugas mengelola dan memelihara peralatan serta perlengkapan pertamanan.

#### Paragraf 5

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.



- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV TATAKERJA

##### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas dan Instansi Vertikal wajib dilakukan koordinasi atas dasar hubungan fungsional dengan sebaik-baiknya.

##### Pasal 26

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar Dinas Daerah dan Instansi lainnya.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah.
- (3) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas Dinas Kebersihan dan Pertamananyang dipimpinnya.

##### Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 25 Peraturan Daerah ini, semua unsur Dinas dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan maupun antara Dinas dengan Instansi Vertikal dan Pemerintah Daerah untuk memperoleh daya guna dan hasil guna sebaik-baiknya, tanpa meninggalkan jalur hierarki yang berlaku.

BAB V  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas Usul Kepala Daerah.
- (3) Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Seksi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Sumber pembiayaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Segala Ketentuan yang berhubungan dengan usaha di bidang kebersihan dan pertamanan yang sudah ada masih tetap berlaku sampai dengan diaturnya ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Kebersihan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dialihkan menjadi tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 21 A Tahun 1995 tanggal 22 Pebruari 1995 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Kebersihan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada tanggal 19 Juli 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TK II HULU SUNGAI SELATAN  
Ketua,

Cap. ttd.

S O E D A R N O

BUPATI KEPALA DAERAH TK.II  
HULU SUNGAI SELATAN,

Cap.

ttd.

Drs. H. SAIDUL HUDARIE

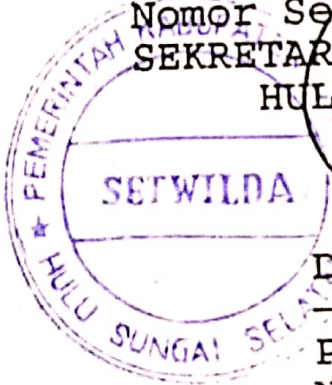
Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Kalimantan Selatan dengan  
Surat Keputusan

Nomor 21 Tahun 1996  
Tanggal 16 Nopember 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu  
Sungai Selatan

Nomor 8  
Pada tanggal 2 Desember 1996  
Tahun 1996  
Seri D

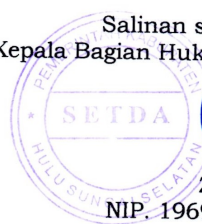
Nomor Seri 5  
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN,



  
Drs. H. M. ARSYAD

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 045 675.

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



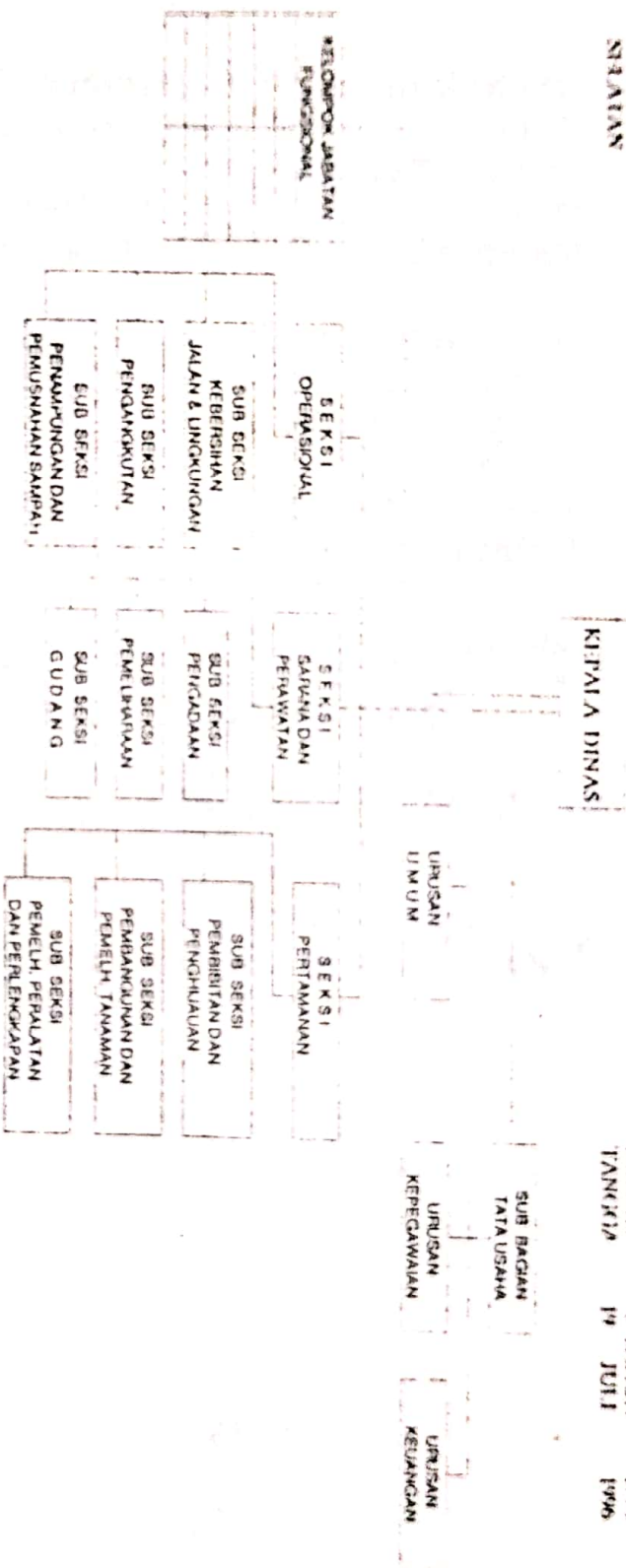
  
ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002



REKAM STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
KEPERAWATAN DAN PERILAKU MANUSIA KAL  
DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI  
SELATAN

1. AMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAerah HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 1996  
TANGGAL 19 JULI 1996



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN

Ketua,  
Cap 11d

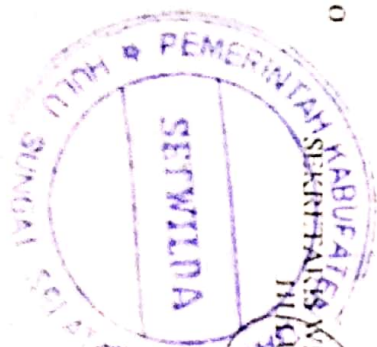
SODIPARNO

KEPADA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN,

Cap

11d

Drs. H. SAIDUL HUDAIRIE



Drs. H. M. ARSYAID  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 045 675